

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2016. *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan yang Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Abdul Asri. 2005. *Manajemen dan resolusi konflik Pilkada*. Jakarta: Cidesindo.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil. 2004. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lailam, Tanto. 2017. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sitem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwanto, agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Surbakti, ramlan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Susetyo, wasis, Dkk. 2016. *Tinjauan terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Tambunan, A.S.S. 1986. *Pemilu di Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Bina Cipta.

### Jurnal :

- Erfian Manuliang, "Parameter Pemilih Demokratik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni, 2017).
- Erman I. Rahim, dkk, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil", *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3, p-ISSN 2614-3216 e-ISSN 2614-3569 (Oktober, 2018).

- Irvan Mawardi, "Pengujian Administrasi terhadap Proses Diskualifikasi Petahana dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.1 No.2, p-ISSN 2615-5222 e-ISSN 2615-5230 (agustus 2018).
- Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.1, , p-ISSN 1829-7706 e-ISSN 2548-1657 (Maret, 2016).
- Ikhsan Darmawan, "Mengapa Kelompok Tidak Setuju Diperlukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?", *Jurnal Politica*, Vol.8 No.1, p-ISSN 2087-7900 e-ISSN 2615-076X (Mei,2017).
- Janpatar Simora,"Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.3 No.1, p-ISSN 2089-9009 e-ISSN 2580-2364 (April,2014).
- Khoiron dan ahmad siboy,"Kemenangan Petahana pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang : Strategi Politik dan Marketing Politik", *Jurnal Publisia( Ilmu Administrasi Publik)*,Vol.3 No.1, p-ISSN 2541-2515 e-ISSN 2541-2035 (April,2018).
- Nandang Alamsah Deliarnoor,"Problematika Pelaksana Tugas dalam masa transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)", *CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan*,Vol.1 No.2, p-ISSN 2442-5958 e-ISSN 2540-8674 (Oktober,2015).
- R. Alief Sudewo,"Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia : Prosen internalisasi rekrutmen calon kapala daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi pada Partai Politik", *Jurnal Bawashu*,Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni,2017).
- Ryan Rizky Arifin Harahap,"Rekrutmen Kepala Daerah Partai Golkar pada Pemilukada Padangsidempuan", *Jurnal Politeia*, Vol.6 No.1, p-ISSN 0216-9290 e-ISSN 2549-175X (Januari,2014).
- Sulardi. Tri Sulistyaningsih, "Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Media Hukum*,Vol.24 No.1, p-ISSN 0854-8919 e-ISSN 2503-1023 (juni,2017).
- Wafia Silvi Dhesinta, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.1, p-ISSN 2356-1440 e-ISSN 2502-230X (Juni,2016).

**Penelitian :**

Aryojati Ardipandanlo, 2015, "*Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015*", Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Septi Nur Wijayanti dan Titin Purwaningsi, 2015, "*Desain Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum dan Politik (Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*", Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Septi Nur Wijayanti, 2017, "*Corporate Political Responsibility (CPR) sebagai upaya mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik*", Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Majalah :**

Komisi Pemilihan Umum, "Majalah suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)" Edisi III Maret –April 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018, Katalog : Kota Makassar dalam angka 2018 (Nomor Katalog :1102001.7371), No Publikasi 73710.1802, Tanggal rilis : 20-08-2018.

**Internet :**

Moch Harun Syah, Ketua KPU : Pilkada Serentak Sejarah Sekaligus Tantangan, 04 Juni 2015, [https://m.liputan6.com/amp/2244960,.\(23.30\)](https://m.liputan6.com/amp/2244960,.(23.30)).

Menteri Dalam Negeri, Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir tahun 2018 dan 2019), [http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/Info OTDA,.\(20.30\)](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/Info_OTDA,.(20.30)).

KPU, Berapa pasangan calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018?, 26 Juni 2018, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.\(20.40\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.(20.40)).

Friski Riana, Soal Pilkada Makassar Golkar Pertanyakan Komentar Gerindra, 1 juli 2018, [https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,.\(21.00\)](https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,.(21.00)).

Kontributor Makassar : Hendra Cipto, KPU Tetapkan Kolom Kosong sebagai pemenang Pilkada Makassar 2018, 7 Juli 2018, [https://regional.kompas.com /2018/07/07/06225871/,.\(12.25\)](https://regional.kompas.com /2018/07/07/06225871/,.(12.25)).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online ,[https://kbbi.web.id/pihak.html,.\(20.00\)](https://kbbi.web.id/pihak.html,.(20.00)).

Pemerintah Kota Makassar, Letak Geografis dan Topografi Kota Makassar, 2 januari 2019, <http://makassarkota.go.id/geografis/..>,(20.00)

**Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan :**

R.I.,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I.,Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

R.I.,Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

R.I.,Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 , tentang “Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII-2015.

**Peraturan Terkait :**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan PKPU No. 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum